

KARAKTERISTIK DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PEMODERASI PERTUMBUHAN EKONOMI

Alfasadun

Pancawati Hardiningsih

pancawati-h@yahoo.com

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang

Indri NurWakhidati

Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, selisih lebih pengeluaran anggaran, dan Luas Wilayah terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kotamadya. Sampel Sampel terpilih sebanyak 35 Kabupaten/Kota dengan teknik sensus. Metode pengambilan data sekunder menggunakan laporan dari BPS di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Analisis menggunakan model *regresi linier berganda* model moderasi dengan basis interaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Demikian juga SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pertumbuhan Ekonomi pengaruh positif terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi memperkuat pengaruh PAD terhadap belanja modal. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi tidak terbukti memperkuat pengaruh SiLPA terhadap belanja modal.

Kata kunci : Pendapatan Asli daerah, SiLPA, Luas Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the Original Income, the difference between the expenditure budget, and the Area of Capital expenditure with economic growth as a moderating variable. Population in this research is Regency / City of Province of Central Java counted 35 which consist of 29 regency and 6 municipality. Sample Samples selected were 35 districts / cities with census technique. Secondary data retrieval method using report from BPS in Regency / Municipality of Central Java Province. The analysis used multiple linear regression model of moderation model with the basis of interaction. The results showed that PAD has a positive effect on capital expenditure. Similarly, SiLPA has a positive effect on capital expenditure. The area has positive effect on capital expenditure. Economic Growth is a positive influence on capital expenditure. Economic growth strengthens the effect of PAD on capital expenditures. While Economic Growth is not proven to strengthen the influence of SiLPA on capital expenditure.

Keywords: local original revenue, SiLPA, area, economic growth, capital expenditure

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapidesentralisasi fiskal. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Halim dan Abdullah, 2006). Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Pemerintah Daerah, yakni

peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Menurut Halim (2002), dengan melakukan belanja modal akan menimbulkan konsekuensi berupa penambahan biaya yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Akan tetapi berdasarkan hasil audit BPK Pemda lebih banyak mengalokasikan belanjanya pada sektor-sektor yang kurang diperlukan dan lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang kurang produktif dibandingkan untuk meningkatkan pelayanan publik, sebab dari 100% belanja daerah rata-rata hanya 21,69% yang digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengadaan aset untuk investasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Semakin banyak belanja modal maka semakin tinggi pula produktivitas perekonomian karena belanja modal berupa infrastruktur jelas berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (Media Indonesia, 2008). Senada dengan hal tersebut Hariyanto dan Hari Adi (2006) menjelaskan bahwa tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas diberbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi dengan melihat fenomena umum yang terjadi, seperti halnya alokasi belanja modal belum sepenuhnya dapat terlaksana bagi pemenuhan kesejahteraan publik, sebab pengelolaan belanja daerah terutama belanja modal masih belum terorientasi pada publik. Salah satunya disebabkan oleh pengelolaan belanja yang terbentur dengan kepentingan golongan semata. Keefer dan Khemani (dalam Halim dan Abdullah, 2006) menyatakan bahwa adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah dimasyarakat. Namun faktanya Pemerintah Daerah dalam pengalokasian pendapatan daerah cenderung digunakan untuk keperluan belanja rutin daripada belanja modal. Kegiatan belanja Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Untuk membiayai pengeluaran tersebut maka dibutuhkan sumber-sumber penerimaan. Sumber penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi umum.

Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanja modal harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah. Sehingga jika Pemerintah Daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan Belanja Modal, maka Pemerintah Daerah harus berusaha keras untuk menggali Pendapatan Asli Daerah yang sebesar-besar

nya. Penelitian yang dilakukan Darwanto dan Yustikasari (2007); Fatmawati dan Riduwan (2013), Wertianti dan Dwirandra (2013), Sholikhah dan Wahyudin (2014), Furqani dan Titimmah (2015) dan Nora, dkk (2015) menemukan bukti empiris bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Berbeda dengan Mentayani dan Rusmanto (2013) dan Ismail (2013) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Selain PAD, Pemerintah Daerah juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD/APBN selama satu periode pelaporan. Dalam LRA juga terdapat penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat berupa hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri, dan dari penerimaan kembali pinjaman yang pernah diberikan pemerintah daerah kepada pihak lain, sedangkan pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, dan pemberian pinjaman kepada pihak lain. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan neto. Selisih antara Surplus/ defisit dengan pembiayaan neto inilah yang disebut sebagai SiLPA (Ardhini, 2011). Penelitian yang dilakukan Mentayani dan Rusmanto (2013) dan Fatmawati dan Riduwan (2013) menemukan bukti empiris bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Berbeda dengan Nora, dkk (2015) menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Luas Wilayah berpengaruh terhadap belanja modal, karena dalam realisasinya belanja modal untuk kepentingan publik cenderung berupa pembangunan fisik disuatu kawasan atau daerah tersebut (Ardhini, 2011). Kaitan antara Luas Wilayah Daerah dengan alokasi Belanja Modal yang dapat

terlihat ketika suatu daerah ingin melakukan pemekaran wilayah dimana disitu terjadi konflik antara daerah dan pusat. Daerah mengalami kecemburuan sosial pada pusat karena alokasi dan distribusi pendapatan yang dikembalikan dari pemerintah pusat ke daerah dari hasil eksplorasi sumber-sumber daya di daerah dirasa kurang adil. Penelitian yang dilakukan oleh Sholikhan & Wahyudin (2014) dan Nora, dkk (2015) menemukan bukti empiris bahwa luas wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan penelitian yang dilakukan Fatmawati dan Riduwan (2013) menemukan bukti bahwa luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian (Hasan, 2012). Salah satu tujuan pemerintah daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahunnya. Penelitian Ismail (2013), Wertianti dan Dwirandra (2013) menemukan bukti empiris bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007), Furqani dan Titimmah (2015) menemukan bukti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Selain itu, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini akan meningkatkan sumber penerimaan daerah dan tentu saja akan membuat penerimaan PAD semakin tinggi. Penelitian Sugiardi dan Supadmi (2014), serta Jaya dan Dwirandra (2014) menemukan bukti empiris bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan dapat memoderasi hubungan PAD pada belanja modal.

Pertumbuhan ekonomi mampu memperkuat hubungan SiLPA pada belanja modal. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi mempengaruhi peningkatan penerimaan daerah, dimana SiLPA merupakan komponen dari penerimaan daerah. Menurut Ardhini (2011) sebagian besar SiLPA disumbangkan ke Belanja Langsung berupa Belanja Modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memperkuat hubungan yang positif antara SiLPA dengan belanja modal.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat dipengaruhi oleh luas wilayah. Semakin luas wilayah yang didukung dengan peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat, maka kebutuhan belanja modal akan semakin meningkat. Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efek pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan SiLPA terhadap Belanja Modal.

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Stewardship

Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, menurut Murwaningsari (2009) Teori *stewardship* berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas.

Pemerintah selaku *steward* dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah

(*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik). Sehingga dapat diterapkan dalam model kasus organisasi sektor publik dengan teori *stewardship*. Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Semakin tinggi PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya (Ardhani, 2011). Kewenangan pemda dalam melaksanakan otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar PAD yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemda dalam melaksanakan kebijakan otonomi. Pelaksanaan otda bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal (Ardhani, 2011). Penelitian (Darwanto & Yustikasari, 2007; Fatmawati & Riduwan, 2013; Furqani & Titimmah, 2015; Jaya & Dwirandra, 2014; Kristiyan, 2016; Nora, 2015; Sholikhah *et al.*, 2014); Fatmawati & Riduwan (2013) menemukan bukti empiris bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H₁ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal

Besar kecilnya SiLPA tergantung tingkat belanja yang dilakukan pemda serta kinerja pendapatan daerah. Jika pada tahun anggaran tertentu tingkat belanja daerah relatif rendah maka dimungkinkan akan diperoleh SiLPA yang lebih tinggi. Namun sebaliknya jika belanja daerah tinggi, maka akan diperoleh SiLPA yang kecil. Sebagian besar SiLPA disumbangkan ke belanja langsung berupa belanja modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat (Ardhani, 2011). Semakin besar SiLPA yang dihasilkan daerah maka alokasi belanja modal akan semakin rendah sebaliknya semakin kecil SiLPA yang dihasilkan suatu daerah maka alokasi belanja modal akan semakin tinggi. Semakin baik pengelolaan dan tingginya belanja suatu daerah maka SiLPA yang dihasilkan juga semakin kecil (Febriana & Praptoyo, 2015). Pendapat ini didukung oleh penelitian Setiyani (2015) menyimpulkan bahwa semakin besar SiLPA yang dihasilkan maka akan menurunkan belanja modal, hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan tidak efektif. Artinya tidak seluruhnya dana SiLPA dialokasikan untuk belanja modal.

H₂: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal

Ketika suatu daerah ingin melakukan pemekaran wilayah dimana disitu terjadi konflik antara daerah dan pusat. Daerah mengalami kecemburuan sosial pada pusat karena alokasi dan distribusi pendapatan yang dikembalikan dari pemerintah pusat ke daerah dari hasil eksplorasi sumber-sumber daya di daerah dirasa kurang adil, sehingga pemda perlu mengeluarkan belanja modal yang lebih untuk fasilitas kepentingan publik di kawasan tersebut. Semakin besar luas wilayah maka semakin besar belanja modal yang harus dikeluarkan pemda untuk kepentingan publik berupa pembangunan fisik maupun fasilitas layanan lain disuatu kawasan atau daerah tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh (Nora, 2015; Sholikhah *et al.*, 2014) menemukan bukti empiris bahwa luas wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Ber

dasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan kegiatan perekonomian suatu daerah. Tanggung jawab pmda kepada masyarakat adalah memberikan layanan publik yang baik kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal. Untuk memperlancar pertumbuhan ekonomi masyarakat harus didukung dengan infrastruktur yang memadai. Adapun sarana dan prasarana tersebut diperoleh dari alokasi anggaran belanja modal yang sudah dianggarkan dalam APBD. Bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik, maka pmda akan meningkatkan alokasi belanja modalnya guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, namun disesuaikan dengan kondisi dan situasi kemampuan daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka belanja modal akan semakin meningkat. Penelitian (Ismail, 2013; Kristiyan, 2016; Wertianti & Dwirandra, 2013; Wulandari, 2013) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan paparan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk juga meningkat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang ditetapkan pmda. Hal ini tentu saja akan meningkatkan sumber PAD. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah juga mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah sehingga akan

mendongkrak PAD. Kontribusi PAD yang tinggi dalam APBD akan digunakan untuk meningkatkan layanan publik agar lebih memadai.

Apabila pendapatan daerah meningkat dan diikuti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka akan meningkatkan belanja modal. Penelitian (Jaya & Dwirandra, 2014; Sugiardi & Supadmi, 2014; Verawaty, 2015) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh PAD terhadap belanja modal. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

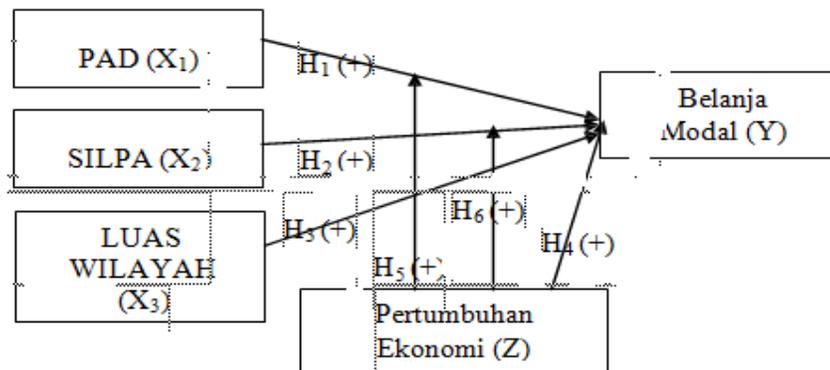
H₅: Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh positif PAD terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh positif SiLPA terhadap Belanja Modal

Semakin baik pengelolaan dan tingginya belanja suatu daerah maka SiLPA yang dihasilkan juga semakin kecil (Febriana & Praptoyo, 2015). Pendapat ini didukung oleh penelitian Setiyani (2015) menyimpulkan bahwa semakin besar SiLPA yang dihasilkan maka akan menurunkan belanja modal, hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan tidak efektif. Artinya tidak seluruhnya dana SiLPA dialokasikan untuk belanja modal. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi peningkatan penerimaan daerah. Namun ketika pertumbuhan ekonomi tinggi maka pmda butuh pembiayaan yang lebih untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan lanjutan, sehingga alokasi belanja modal akan semakin tinggi. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memperkuat hubungan antara SiLPA dengan belanja modal. Hasil penelitian Wakhidati (2015) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh SiLPA terhadap belanja modal.

H₆: Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh positif SiLPA terhadap Belanja Modal

Model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten /Kota Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kotamadya. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten / Kota Provinsi JawaTengah.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di ambil melalui BPS di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah, secara berkala untuk melihat perkembangan dari Pendapatan Asli Daerah, SiLPA dan Luas Wilayah, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi selama periode tahun 2012-2014.

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan catatan / data yang diperlukan sesuai penelitian yang akan dilakukan dari dinas/kantor/instansi atau lembaga terkait (Arikunto,2002). Laporan-laporan yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, SiLPA, Luas Wilayah, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi. Data sekunder tersebut diperoleh dari dokumen resmi yang dikeluarkan instansi yang terkait berupa Laporan Realisasi APBD dan Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2015.

DefinisiOperasional danPengukuranVariabel

Belanja Modal.

Menurut PPNo.71 Tahun 2010, Belanja Modal merupakan belanja Pemerintah Daerah

yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Modal diukur dalam satuan Rupiah yang diperoleh dari jumlah Belanja Modal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut UUNo.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah diukur dalam satuan Rupiah yang diperoleh dari jumlah Pendapatan Asli Daerah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

SiLPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan sisa dalam pembiayaan anggaran tahun sebelumnya. SiLPA dihitung dari total pemasukan daerah dikurangi total pengeluaran daerah. Total pemasukan daerah mencakup penerimaan PAD, dana perimbangan (DAU dan DAK), penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.Total pengeluaran daerah terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan,

belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja lain-lain. Variabel yang diukur dari jumlah SiLPA yang ada di Laporan Realisasi APBD pemerintah daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah padatahun anggaran 2012 – 2014

Luas Wilayah

Luas wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistem nya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan atau aspek fungsional (Ardhini, 2011).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomia dalah proses kenaikan *output* perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Boediono,1985). Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi diukur dengan PDRB. Produk Domestik Regional Bruto perkapita adalah salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (sektor) dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dan dihitung menurut harga konstan.

Pengujian Hipotesis

Pada penelitian ini, uji model untuk pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). MRA merupakan aplikasi khusus *regresi berganda linear* dimana dalam persamaan mengandung unsur interaksi, yaitu

perkalian dua atau lebih variabel independen (Ghozali,2011).

$$BM = a + \beta_1 PAD + \beta_2 SiLPA + \beta_3 LW + \beta_4 PE + \beta_5 PAD * PE + \beta_6 SiLPA * PE + e$$

Keterangan Persamaan Regresi

- BM = Belanja Modal
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- SiLPA = Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran
- LW = Luas Wilayah
- PE = Produk Domestik Regional Bruto
- PAD*PE = Interaksi antara PAD dengan PDRB
- SiLPA*PDRB = Interaksi antara SiLPA dengan PDRB
- a = Konstanta
- $\beta_1 \dots \beta_6$ = Koefisien regresi Variabel

Uji Normalitas

Uji normalitas pada tabel 1 menunjukkan nilai *skewness* sebesar 0,283 dan nilai *Kurtosis* sebesar -0,183; maka dengan perhitungan rumus diperoleh hasil:

$$Z_{skewness} = \frac{0,283}{\sqrt{6/104}} = 1,111 \quad Z_{Kurtosis} = \frac{-0,183}{\sqrt{24/104}} = -1,028$$

Nilai *skewness* diperoleh sebesar 1,111 dan nilai *Kurtosis* sebesar -1,028 , dimana nilai *skewness* dan *Kurtosis* kurang dari $\pm 1,96$. Hal ini berarti bahwa *unstandardized residual* memiliki distribusi normal.

Tabel 1. Descriptive Statistics

	N	Mean		Skewness		Kurtosis	
		Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Standardized Residual	104	,0000000	,237	,283	,237	-,183	,178
Valid N (listwise)	104						

Uji Asumsi Klasik

Autokorelasi

Berdasarkan tabel 2 nilai *Durbin-Watson* sebesar 2,070. Dengan jumlah data sebanyak 104 dan variabel independen

sebanyak 6 variabel dengan metode uji *one – tailed* didapatkan nilai $d_l = 1,54$ $d_u = 1,83$. Maka koefisien D-W (2,070) diantara D_U (1,83) dan $4-D_U$ (2,17), sehingga disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi masalah *autokorelasi*.

Tabel 2. Uji *Autokorelasi*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,889 ^a	,790	,787	50077,60399	2,070

Multikolinieritas

Berdasarkan tabel 3 hasil perhitungan nilai VIF menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari

10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada *multikolinieritas* antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 3. Uji Multikolonieritas

Variabel	VIF	Keterangan
PAD	7,133	No Multikolinearitas
SILPA	6,567	No Multikolinearitas
LW	1,394	No Multikolinearitas
PE	4,794	No Multikolinearitas
PAD_PE	4,362	No Multikolinearitas
SILPA_PE	9,390	No Multikolinearitas

Heteroskedastisitas

Hasil uji *heteroskedastisitas* menggunakan uji *Glejser* menunjukkan nilai signifikansi dari keenam variabel dalam penelitian tersebut

didasar 0,05. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa model penelitian tersebut tidak terjadi *heteroskedastisitas*.

Tabel 4. Uji *Heteroskedastisitas*

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	52710,263	66048,928		,798	,428
	PAD	,097	,085	,375	1,144	,256
	SILPA	,047	,070	,119	,678	,499
	LW	15,600	7,978	,288	1,956	,063
	PE	-24,387	25,139	-,168	-,970	,336
	PAD_PE	-3,653E-10	,000	-,149	-,346	,730
	SiLPA_PE	-2507,549	1814,309	-,177	-1,382	,172

Goodness of Fit Models**Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi (R^2) pada tabel 2 ditunjukkan dari nilai adjusted R^2 sebesar 0,787 dapat diartikan bahwa 78,7% variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh PAD, SiLPA, Luas Wilayah, dan Pertumbuhan Ekonomi sedangkan 21,3% Belanja Modal dijelaskan oleh faktor lainnya diluar model.

Berdasarkan perhitungan tabel 5 diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan bahwa Belanja Modal dapat dijelaskan oleh PAD, SiLPA, Luas Wilayah, Pertumbuhan Ekonomi, dan moderasinya. Hasil analisis disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sehingga secara keseluruhan model penelitian tersebut adalah fit.. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut:

F Test

Tabel 5. Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8,851E11	6	1,475E11	52,546	,000 ^a
	Residual	2,723E11	97	2,807E9		
	Total	1,157E12	103			

Uji Hipotesis

Hasil persamaan *regresi linier berganda* ditunjukkan pada tabel 6 sebagai berikut.

$$BM = 265520,152 + 0,733 \text{ PAD} + 0,337 \text{ SiLPA} + 60,734 \text{ LW} + 4,001 \text{ PE} + 13,239 \text{ PAD_PE} + 2745,507 \text{ SiLPA_PE} + e$$

Tabel 6. Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	265520,152	170700,976		1,555	,123		
	PAD	,733	,115	,789	6,345	,000	,140	7,133
	SILPA	,337	,171	,235	1,972	,051	,152	6,567
	LW	60,734	10,676	,313	5,689	,000	,717	1,394
	PE	4,001	,101	7,344	7,626	,000	,209	4,794
	PAD_PE	13,239	2,027	12,703	7,242	,004	,097	4,362
	SiLPA_PE	2745,507	4711,443	,083	,583	,561	,106	9,390

Berdasarkan pada tabel 6 diperoleh nilai signifikan variabel PAD sebesar 0,000 menunjukkan bahwa **H₁ terdukung** bahwa peningkatan PAD akan meningkatkan Belanja Modal. Sedangkan nilai signifikan variabel SiLPA sebesar 0,051 menunjukkan bahwa **H₂ tidak terdukung** bahwa SiLPA memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Pada variabel LW nilai signifikan sebesar 0,000 menunjukkan bahwa **H₃ terdukung** bahwa semakin besar LW akan meningkatkan Belanja Modal. Sementara pada variabel PE nilai signifikan sebesar 0,000 menunjukkan bahwa **H₄ terdukung** bahwa semakin tinggi PE, maka akan meningkatkan Belanja Modal. Selanjutnya nilai signifikan variabel PAD_PE sebesar 0,004 menunjukkan bahwa **H₅ terdukung** bahwa PE memperkuat pengaruh PAD terhadap Belanja Modal. Dan nilai signifikan variabel SiLPA_PE sebesar 0,561 menunjukkan bahwa **H₆ tidak terdukung** bahwa PE tidak terbukti memoderasi pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka belanja modal juga semakin tinggi. Kondisi demikian menunjukkan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah meningkat. Hal ini menunjukkan kerja keras pemda dalam meningkatkan PAD. Hasil penelitian ini mendukung teori *stewardship*, dimana pemerintah sebagai *steward* berusaha menyelesaikan pembangunan daerah dari PAD yang diperoleh. Oleh karena itu sebagian kesejahteraan rakyat terwujud. Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemda berusaha maksimal meningkatkan pajak daerah dan retribusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini tercapai maka rakyat akan merasa puas dengan kinerja pemerintah. Temuan ini sejalan dengan (Ismail, 2013; Wertianti & Dwirandra, 2013; Hardiningsih, 2017) menemukan PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal

Penelitian ini menunjukkan bahwa SiLPA tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Semakin tinggi SiLPA akan meningkatkan pengeluaran belanja modal. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa SiLPA adalah selisih lebih / kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Surplus yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya disebut dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Ada tidaknya SiLPA dan besar kecilnya sangat tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah. Jika pada tahun anggaran tertentu tingkat belanja daerah relatif rendah atau terjadi efisiensi anggaran, maka dimungkinkan akan diperoleh SiLPA yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya jika belanja daerah tinggi, maka SiLPA yang diperoleh akan semakin kecil, bahkan jika belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah sehingga menyebabkan terjadi defisit fiskal, dan justru terjadi Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Salah satu sumber pendanaan untuk alokasi belanja modal penyediaan berbagai fasilitas publik adalah penerimaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Penelitian ini sejalan dengan Mentayani dan Rusmanto (2013); Fatmawati & Riduwan (2013); Yohanes (2014); dan Hardiningsih (2017) menemukan bahwa SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Luas Wilayah terhadap belanja modal

Penelitian ini menunjukkan bahwa luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar wilayah suatu daerah maka pengeluaran pemerintah atas Belanja Modal juga akan semakin tinggi. Dalam realisasinya belanja modal untuk kepentingan publik cenderung berupa pembangunan fisik dikawasan atau daerah tersebut (Ardhini, 2011).

Hubungan antara Luas Wilayah Daerah dengan alokasi Belanja Modal dapat terlihat ketika suatu daerah ingin melakukan pemekaran wilayah dimana disitu terjadi konflik antara daerah dan pusat. Daerah mengalami kecemburuan sosial pada pusat karena alokasi dan distribusi pendapatan yang dikembalikan kedaerah dari hasil eksplorasi sumber-sumber daya di daerah dirasa kurang adil. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Nora, 2015; Sholikhah *et al.*, 2014); Wakhidati (2014); dan Hardiningsih (2017) menemukan bukti empiris bahwa luas wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal. Keadaan ini memberi indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki kontribusi positif terhadap belanja modal. Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Bila pemerintah mampu mencapai tujuan tersebut, maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, masyarakat berperan sebagai prinsipal merupakan objek pengukuran pertumbuhan ekonomi. Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memberikan pelayanan yang baik melalui alokasi belanja modal sehingga aktivitas masyarakat berkembang. Untuk memperlancar pertumbuhan ekonomi masyarakat harus didukung dengan infrastruktur yang memadai. Adapun sarana dan prasarana tersebut diperoleh dari alokasi anggaran belanja modal yang sudah dianggarkan dalam APBD. Eksekutif akan mengusulkan anggaran belanja lebih besar dari yang terjadi saat ini. Bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik, maka pemda akan meningkatkan alokasi belanja modalnya guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, namun disesuaikan dengan kondisi dan situasi kemampuan daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka Belanja Modal akan semakin meningkat. Penelitian (Ismail, 2013; Kristiyan, 2016; Wertianti & Dwirandra, 2013) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal. Namun tidak sejalan dengan (Darwanto & Yustikasari, 2007; Furqani & Titimmah, 2015; Hidayati, 2015; Wakhidati, 2014; dan Hardiningsih, 2017)

bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Penerimaan PAD pada periode pengamatan mulai meningkat, menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh pemda mulai meningkat. Kondisi demikian menunjukkan kesadaran masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak dan retribusi mulai membaik. Sementara tingkat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi maka akan menuntut tingkat belanja modal juga tinggi. Adanya pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Kondisi ini menuntut jumlah pendanaan yang besar. Namun pendapatan daerah yang diperoleh mulai merangkak naik membutuhkan jumlah yang cukup untuk menutup belanja modal. Sehingga menuntut pemda harus kerja keras untuk meningkatkan PAD. Karena dengan PAD yang tinggi dapat digunakan pemda untuk meningkatkan layanan publik dan sebagai konsekuensi meningkatkan belanja modal. Temuan ini sejalan dengan (Jaya & Dwirandra, 2014; Sugiardi & Supadmi, 2014; Wakhidati, 2017; dan Hardiningsih, 2017) bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan dapat memperkuat pengaruh PAD terhadap belanja modal. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat dan disertai dengan pendapatan daerah yang semakin tinggi, maka semestinya mampu meningkatkan belanja modal daerah.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh SiLPA Terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi pengaruh SiLPA terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan adanya masalah keagenan yang di timbulkan kalangan eksekutif (pempus) cenderung memaksimalkan *utility (selfinterest)* dalam pembuatan atau penyusunan APBD, karena memiliki asimetri informasi. Akibatnya eksekutif cenderung melakukan "*budgetary slack*". Hal ini mengakibatkan pihak eksekutif akan mengamankan posisinya dalam pemerintahan dimata legislatif masyarakat / rakyat, bahkan untuk kepentingan pilkada berikutnya, tetapi *budgetary slack* APBD lebih banyak untuk kepentingan *selfinterest* dari pada untuk kepentingan masyarakat. Sehingga terjadinya peri

laku *opportunistik* yang dimanfaatkan oleh pihak pemus dan pemda dapat mempengaruhi kesenjangan pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah. Adanya kesenjangan dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi terganggu tidak mampu memoderasi pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal. Temuan ini sejalan dengan Wakhidati (2017) dan Hardiningsih (2017) bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak terbukti memoderasi pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal.

SIMPULAN

PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Demikian juga SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. LW berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil yang sama juga pada PE pengaruh positif terhadap belanja modal. Pada hasil moderasi pertumbuhan ekonomi terbukti memperkuat pengaruh PAD terhadap belanja modal. Sedangkan PE tidak terbukti memperkuat pengaruh SiLPA terhadap belanja modal. Model penelitian ini mampu menjelaskan variance belanja modal cukup besar yaitu 78,7 % yang berarti model tersebut cukup fit. Dari hasil penelitian tersebut ternyata PE adalah variabel yang dominan berpengaruh terhadap belanja modal.

Implikasi

Penelitian ini memberikan implikasi bagi pihak pemerintah maupun akademisi.

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan sebuah kebijakan dan koreksi dalam pengambilan keputusan. Terlebih untuk pemerintah pusat dalam kebijakan pengalokasian dan pemerintah daerah dalam penggunaan dana.
2. Pemerintah daerah diharapkan lebih mengembangkan potensi dan sektor-sektor ekonomi daerah untuk mendongkrak PAD agar lebih mandiri secara finansial dalam mendanai seluruh aktivitas pemerintahan.
3. Pemerintah daerah harus lebih bijak dalam memanfaatkan PAD dan SiLPA untuk meningkatkan pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana publik agar lebih merata

pada wilayah daerahnya sehingga dapat meningkatkan produktivitas publik.

4. Bagi akademisi, hasil penelitian berguna untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai PAD, SiLPA, Luas Wilayah, Pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal.
5. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya dengan melakukan analisis komparasi belanja daerah berdasarkan pengelompokan daerah yang mandiri dan yang belum mandiri serta analisis komparasi belanja daerah berdasarkan luas wilayah.

Saran

Penelitian mendatang perlu memperpanjang periode amatan sehingga dapat dilihat perilaku pemerintah daerah dalam menggunakan belanja modal.

Perlu menggunakan proxy yang lebih akurat pada variabel pertumbuhan ekonomi dan luas wilayah sehingga bisa menggambarkan kondisi yang sesungguhnya

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek*. Jakarta: RinekaCipta.
- Ardhini. (2011). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (studi pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arwatidan Hadiati. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Barat. *Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013 (SEMANTIK 2013)*

- Bastian, Indra. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Boediono, (1985). *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE
- Darwanto & Yustikasari, Yulia. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makassar.
- Ghozali, Imam. (2011). *Analisis Multivariate Program IBM SPSS19*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul, (2004), *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di Pemerintahan Daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64
- Harianto, David dan Priyo Hari Adi, (2007). Hubungan Antara Dana Alokasi, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makassar.
- Hasan, T.I.B. (2012). Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penduduk Miskin di Aceh. *Journal SAINS Riset*, 1(1).
- Indriantoro, Nur, and Supomo, Bambang, (2001), *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: BPFE
- Jaya dan Dwirandra. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.1(2014):79-92
- Kawedar, Warsito dkk, (2008). *Akuntansi Sektor Publik*, Semarang UNDIP.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Nuarisa, sheila Ardhian. (2013). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sugiarthi dan Supadmi. (2014). Pengaruh PAD, DAU, dan SILPA pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.2 (2014): 477-495
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Taiwo, Muritala and Taiwo Abayomi. (2011). Government Expenditure and Economic Development. *European Journal of Business and Management*, 3(9).
- Tuasikal, Askam. (2008). Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 1(2), h:142-155.
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
- Von Hagen, Jurgen. (2002). Fiscal rules, fiscal institutions, and fiscal performance. *The Economic and Social Review* 33(3): 263-284.
- Wakhidati, Indri Nur. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Silpa Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. Skripsi.

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang.

Wandira, Arbie Gugus. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>

Wulandari, dkk. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabu

paten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2005-2012). <http://ejournal-s1.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/Ekonomi/article/view/1129>

Yovita, Farah Marta. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008–2010). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro